



## **Identitas dalam Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Peran Norwegia sebagai Peace Nation dalam Upaya Perdamaian Israel – Palestina**

**Pretty Agnes**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*For many years, the increasing number of death and regional damage as the effects of Israel-Palestine's prolonged conflict has been an international threat to world peace. This phenomenon encourages international relations actors to contribute in the peace efforts for two involved countries, including Norway. The contribution of Norway is realized by its involvement in Oslo Accord and the Ad Hoc Liasion Committee (AHLC), and also from another Norway's foreign policies. This research aims to explain the purpose behind the foreign policy of Norway that tends to the efforts of Israel-Palestine's conflict. By using the constructivism approach, specifically the role-concept, this study emphasizes the Norway's role as a peace nation. This research concludes that the foreign policies of Norway in Israel – Palestinian conflict resolution is a representation of Norway's identity as a peace nation.*

**Keywords:** *Norway, foreign policy, peace nation, Oslo Accord, AHLC*

### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 1941, Trygve Lie (dalam Pisarska, 2016, p.54) menyatakan bahwa negara-negara kecil biasanya tidak memiliki ambisi politik dan lebih memfokuskan kepentingan pada aspek ekonomi, sosial dan budaya, sehingga kebijakan luar negerinya cenderung berorientasi pada kontribusi dalam upaya perdamaian dunia. Hal ini kemudian memunculkan istilah *peace niche diplomacy*, yang berarti upaya diplomasi perdamaian yang diupayakan oleh negara-negara kecil. Salah satu negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Norwegia (Skanland, 2010, p.40).

Meskipun memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil, kebijakan luar negeri Norwegia yang berorientasi pada perdamaian dunia dapat dibuktikan melalui berbagai partisipasi aktif Norwegia dalam upaya resolusi konflik internasional, diantaranya yaitu konflik Israel-Palestina. Keberhasilan Norwegia dalam mendukung kedua negara berkonflik untuk menyepakati *Oslo Accord* serta peran pentingnya dalam *Ad Hoc Liasion Committee* (AHLC) menjadikan Norwegia

---

sebagai sorotan berbagai aktor hubungan internasional, salah satunya yaitu Presiden AS, Bill Clinton, yang menyatakan bahwa peran Norwegia dalam *Oslo Accord* adalah titik awal perdamaian kedua negara berkonflik (The Foreign Policy, 2018).

Gagasan mengenai pembatasan akses media (*back channel*) dalam proses perundingan *Oslo Accord* oleh Norwegia menjadi hal baru dalam sistem perundingan yang pernah dilakukan oleh kedua negara sebelumnya. Hal ini diterapkan dengan tujuan untuk mencegah intervensi pihak lain yang berpotensi menciptakan instabilitas perundingan. Selain itu, prinsip *mutual recognition* yang menjadi dasar pelaksanaan perundingan menempatkan Israel dan Palestina di posisi yang sama, sehingga setiap ketentuan yang disepakati tidak mengindikasikan adanya dominasi dari salah satu pihak (New York Times, 2015). Melalui perundingan ini kemudian, dibentuklah *Sarpsborg Declaration of Principles* (DoP), sebagai pedoman kedua negara dalam pelaksanaan perundingan-perundingan selanjutnya.

Selain DoP, AHLC juga lahir sebagai salah satu *output* dari *Oslo Accord*. Komite ini dibentuk pada 1 Oktober 1993 sebagai wujud koordinasi aktor hubungan internasional dalam pemberian bantuan pembangunan terhadap masyarakat Palestina. Komite yang dipimpin oleh Norwegia ini memiliki beberapa anggota, diantaranya: Palestina, Israel, Kanada, Mesir, Jepang, Yordania, Rusia, Arab Saudi, Tunisia, IMF, PBB, dengan Uni Eropa dan AS sebagai sponsor, dan World Bank sebagai Sekretariat (UNSCO, 2017). Dengan kata lain, AHLC berfungsi sebagai wadah bagi aktor hubungan internasional, negara maupun non-negara, untuk memberikan bantuan terhadap kerusakan dan penderitaan yang terjadi sebagai akibat dari konflik antara Israel dan Palestina.

Komitmen Norwegia dalam upaya perdamaian Israel-Palestina tidak hanya diwujudkan melalui *Oslo Accord* dan AHLC, namun juga berbagai kebijakan luar negeri berupa bantuan kemanusiaan serta berbagai respon terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan konflik tersebut. Pada 1 Oktober 1993, Menteri Luar Negeri Norwegia, Johan Holst, menyatakan bahwa bantuan dana senilai US\$35 juta yang diberikan kepada Palestina adalah atas nama warga Norwegia yang mencintai perdamaian dan mengharapkan agar perdamaian tersebut juga dapat diimplementasikan dalam konflik tersebut (Grevle, 2012, p.31). Respon Norwegia yang menentang tindak kekerasan oleh pihak Israel dan Palestina serta menghimbau kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata dalam tragedi *50 Days of War* pada tahun 2014 menjadi salah satu pembuktian komitmen Norwegia dalam mendukung upaya perdamaian kedua negara (United Nations, 2014).

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan luar negeri Norwegia yang cenderung berorientasi pada perdamaian dunia, salah satu wujudnya yaitu melalui peran strategisnya dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dari sudut pandang konstruktivis, secara spesifik yaitu konsep identitas. Hal ini dikarenakan konsep ini mampu menjelaskan latar belakang di balik kecenderungan orientasi kebijakan luar negeri Norwegia sebagai negara. Identitas sebagai salah satu gagasan penting dalam konstruktivis mampu menjadi faktor determinan bagi para pemangku kebijakan, maupun elit politik dalam menentukan kebijakan luar negeri negara dalam sistem internasional.

Penelitian ini berargumen bahwa kontribusi Norwegia dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dipengaruhi oleh identitas peran Norwegia sebagai negara damai (*peace nation*). Identitas inilah yang kemudian menjadi faktor yang menstimulus terbentuknya kepentingan nasional Norwegia, yang selanjutnya diwujudkan melalui kebijakan luar negeri. Identitas sebagai negara damai yang disandang oleh Norwegia kemudian menstimulus terbentuknya kepentingan nasional yang berorientasi pada perdamaian dunia sehingga peran aktif Norwegia dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah salah satu wujud penerapan kebijakan luar negeri yang merepresentasikan identitas peran yang dimiliki oleh Norwegia.

## **PEMBAHASAN**

### **Kontribusi Norwegia dalam Oslo Accord**

Tingginya tingkat kematian dan kerusakan fisik terhadap properti pribadi dan fasilitas umum di kedua negara, baik Israel dan Palestina menjadikan konflik tersebut menjadi salah satu konflik yang mendapat begitu banyak sorotan dari aktor hubungan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa dalam penyerangan 50 hari (*50-days of War*) yang berlangsung pada 8 Juli hingga 26 Agustus 2014 di Jalur Gaza, tercatat korban jiwa sebanyak 1.523 warga sipil dan 519 anak-anak, kehancuran sekitar 37.650 unit rumah serta 110.000 warga menjadi pengungsi di penampungan darurat (Amnesty International, 2014, p. 1).

Sebagai aktor hubungan internasional, negara-negara di berbagai belahan dunia memandang bahwa konflik Israel – Palestina perlu segera dihentikan. Oleh sebab itu, beberapa negara berusaha terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Salah satunya pada tahun 1991, AS menjadi salah satu negara pelopor dalam upaya penyelesaian konflik tersebut melalui pelaksanaan *Madrid Peace Conference*. Namun, konferensi ini ternyata belum cukup efektif karena dalam perundingannya membahas mengenai isu-isu yang dihindari pemerintahan Israel yang pada saat itu didominasi oleh kalangan dari Partai Buruh (*Israeli Labor Party*), seperti isu pelaksanaan Resolusi PBB, pengimplementasian hukum internasional, dan legalitas okupasi (Waage, 2005, p.2). Dengan kekuatan yang dimiliki dan catatan kesuksesannya dalam perundingan penyelesaian konflik Timur Tengah lainnya, seperti konflik Irak – Kuwait, AS ternyata belum mampu mengendalikan Israel dalam konferensi ini.

Kegagalan penyelesaian konflik melalui intervensi AS dalam konferensi tersebut kemudian menstimulus Palestina mencari alternatif lain untuk kembali melakukan negoisasi dengan Israel. Melalui Ketua Organisasi Perjuangan Palestina yang dikenal dengan *Palestine Liberation Organization* (PLO), Yasser Arafat, Palestina meminta Norwegia untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik ini, dan diterima dengan baik oleh Norwegia. Norwegia menjadi negara target oleh Palestina setelah melalui banyak pertimbangan, diantaranya Norwegia memiliki relasi yang baik dengan Israel dan Palestina. Selain itu, Norwegia dikenal sebagai negara yang menerapkan kebijakan yang lekat dengan nilai-nilai kemanusiaan (*strong humanitarian tradition*) (Waage, 2004, p.3-4).

Pada tahap selanjutnya, Norwegia mengirimkan pesan kepada Israel agar perundingan antar kedua negara berkonflik dilangsungkan di Norwegia, dengan

prinsip kerahasiaan (*secrecy*). Dalam konteks ini, *secrecy* dijadikan aturan utama (*ground rules*) oleh Norwegia dalam keberlangsungan perundingan untuk meminimalisir publikasi dan intervensi oleh pihak manapun selain Israel dan Palestina, sehingga dikenal dengan istilah “*Oslo back channel*” (Shlaim, 2005, p.2). Dalam hal ini, Norwegia menjelaskan posisinya sebagai fasilitator, dan bukannya mediator.

Norwegia berusaha untuk menjembatani kontak politik yang diharapkan dapat diaplikasikan secara maksimal agar tidak terjadi lagi kebuntuan (*stalemate*) dalam perundingan seperti pada saat Konferensi Madrid. Norwegia hanya akan berusaha mempertemukan Israel dan Palestina, menyediakan segala fasilitas bagi kedua pihak dengan komposisi yang setara, seperti pemesanan tiket pesawat dan hotel, menyusun jadwal pertemuan kedua pihak, menjaga kerahasiaan negosiasi dari pihak luar (Waage, 2005, p.4). Selain itu, Norwegia juga berusaha menumbuhkan kepercayaan antara kedua pihak dengan menyediakan makanan dan minuman, menciptakan ruang informal (*outdoor walks*) agar para delegasi dari kedua pihak memiliki waktu untuk saling berkomunikasi secara informal demi menstimulus mosi saling percaya, meminimalisir sifat skeptis dan memperjelas kesalahpahaman di antara kedua pihak (Waage, 2005, p.4).

Perundingan ini dimulai pada akhir Januari 1993 dengan Dr. Yair Hirschfeld and Dr Ron Pundak, akademisi-akademisi terkemuka Israel sebagai delegasi dari negara tersebut, serta Ahmad Qurei atau yang lebih dikenal dengan Abu Ala, seorang pejabat PLO, sebagai delegasi dari Palestina. Sementara itu, Norwegia sebagai fasilitator menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri, Jan Egeland, Terje Rød-Larsen, seorang diplomat dan akademisi beserta istrinya, Mona Juul, yang adalah seorang diplomat (Shlaim, 2005, p.3). Perundingan ini berlangsung dalam 14 sesi selama 8 bulan dengan kerahasiaan penuh, tanpa sorotan media dan publikasi sehingga pada Maret 1993, disepakatilah *Sarpsborg Declaration of Principles* (DoP) sebagai pedoman dalam keberlanjutan perundingan kedua negara.

Selanjutnya, pada Mei 1993, Israel mengirim Direktur Jenderal Luar Negeri, Uri Savir dan salah satu diplomatnya, Yoel Singer, bergabung dengan Hirschfeld dan Pundak untuk melanjutkan perundingan dengan Palestina. Dengan hadirnya kedua tokoh tersebut, perundingan *back channel* ini menjadi resmi. Namun, perundingan ini kembali bergejolak ketika Singer melakukan revisi secara sepihak terhadap DoP, dan diajukan untuk dibahas dalam perundingan (Waage, 2004, p.6). Menanggapi hal ini, Abu Ala memandang bahwa Israel berusaha untuk mendominasi perundingan, dan substansi dari revisi DoP tersebut menyudutkan Palestina karena menentukan otonomi Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat (*West Bank*) (Morris, 2009, p.136). Hal ini kembali mengancam keberlangsungan perundingan, karena kedua pihak saling mengutamakan kepentingan masing-masing dan sangat sulit mencapai kesepakatan. Norwegia memandang bahwa perannya sebagai fasilitator tidak lagi efektif. Oleh karena itu, Norwegia berusaha meningkatkan perannya menjadi negara mediator, dengan mengutus Menteri Luar Negeri Johan Jørgen Holst, untuk menengahi perdebatan diantara kedua pihak.

Dalam perkembangannya, Holst telah melakukan berbagai cara agar kedua pihak bersedia melakukan kesepakatan, diantaranya yaitu melalui kunjungan resmi ke

Israel pada Juni 1993 serta kunjungan ke Palestina pada Juli 1993 dengan tujuan untuk membahas kelanjutan dan orientasi perundingan. Selain itu, Holst juga memelopori diadakannya perundingan yang menghadirkan delegasi kedua pihak di Halvorsbøle, Norwegia. Puncaknya, pada 13 September 1993, perundingan Oslo (*Oslo Accord*) ditandatangani oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan Perdana Menteri Israel Shimon Peres, pada 13 September 1993 di Washington D.C, AS yang berisi penekanan terhadap prinsip *mutual recognition*. Artinya, Israel-Palestina sepakat untuk berkomitmen menyelesaikan konflik secara damai, menerima resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338, mengancam terorisme dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya serta menarik pasukan Israel yang berada di wilayah-wilayah Palestina, serta kesepakatan untuk membiarkan otoritas Palestina mengatur pemerintahannya sendiri (Shlaim, 2005, p.6).

### **Kontribusi Norwegia dalam AHLC**

Penandatanganan *Oslo Accord* pada akhirnya menjadi salah satu wujud kesepakatan Israel – Palestina untuk menciptakan resolusi konflik antar kedua negara dengan DoP sebagai basis dari kesepakatan tersebut. Dalam konteks ini kemudian, dibentuklah sebuah komite yang juga lazim disebut grup donor internasional, yaitu *Ad Hoc Liaison Committee* (AHLC). Komite ini dibentuk pada 1 Oktober 1993 sebagai tindak lanjut dari pengimplementasian pasal 10 DoP dan berfokus untuk menangani berbagai dampak buruk konflik yang terjadi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Selain memberikan bantuan dana, penanganan ini juga diwujudkan melalui observasi lokasi konflik yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman laporan (*report*) kepada kedua negara berkonflik berikut negara anggota dan negara donor (Local Aid Coordination Secretariat, 2011). Dipimpin oleh Norwegia, komite ini beranggotakan Palestina, Israel, Kanada, Mesir, Jepang, Yordania, Rusia, Arab Saudi, Tunisia, IMF, PBB, dengan Uni Eropa dan AS sebagai sponsor, dan Bank Dunia sebagai Sekretariat (UNSCO, 2017).

*International Business Publication USA* (dalam Palestine (West Bank and Gaza) Business Publication USA, 2016:73-74) memaparkan fungsi AHLC, yaitu :1.) Melakukan koordinasi serta promosi terkait bantuan yang berasal setiap pihak yang berperan sebagai donor, 2.) Melakukan transparansi dalam setiap aktivitas dari setiap donor, sekretariat, maupun penerima; 3.) Membentuk forum formal khusus yang menjadi wadah bagi para donor untuk melakukan diskusi terkait hal-hal yang telah dan akan dilakukan terkait bantuan terhadap penerima. Fungsi ini diwujudkan melalui pertemuan secara berkala para anggota AHLC, pihak donor serta delegasi Israel - Palestina; 4.) Melakukan pengawasan terkait pertumbuhan ekonomi di daerah konflik; 5.) Memberikan ulasan (*review*) terhadap laporan terkait situasi di daerah konflik setelah dibahas dalam pertemuan dengan para donor; 6.) Merespon setiap aspirasi dari korban konflik, termasuk diantara kebutuhan korban yang disesuaikan dengan ketentuan dalam DoP; 7.) Membuka peluang bagi setiap donor yang berpotensi melakukan investasi dalam bidang rekonstruksi bangunan fisik (*infrastructure*) hanya di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dalam komite ini, kontribusi Norwegia diwujudkan melalui peran pentingnya sebagai negara pemimpin dengan menginisiasi pembentukan berbagai lembaga yang

bertujuan meningkatkan perkembangan Palestina, diantaranya melalui *Palestinians Economic Council for Development and Construction* (PECDAR). Dalam PECDAR, Norwegia menjadi negara penyumbang dana terbesar, yaitu sekitar US\$150 juta dari total US\$2 miliar pada tahun 1993. Selain itu, Norwegia juga menginisiasi dibentuknya *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH) pada Mei 1995 sebagai respon atas tragedi pembunuhan umat muslim di wilayah Hebron pada 25 Februari 1995. Dengan dipimpin oleh Norwegia, komite ini berhasil menarik perhatian dunia terkait upaya penyelidikan kasus di Hebron sehingga beberapa negara yaitu Turki, Italia, Swiss, Denmark, dan Swedia bersedia bergabung dan mengirimkan total 120 delegasi yang berperan sebagai pengawas (*observer*) (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 1999). Bahkan, Norwegia memberikan kontribusi dana sejumlah US\$2 juta untuk pengeluaran awal lembaga tersebut (Grevle, 2012, p.42)

Selain itu, Norwegia sebagai pemimpin dalam AHLC juga memberi perhatian besar pada pengungsi yang menjadi korban dari konflik kedua negara. *Norwegian Ministry of Foreign Affairs* (1999) mencatat bahwa Norwegia menyumbang US\$46,7 juta kepada Palestina pada pertengahan tahun 1998 dan seperempat dari total dana tersebut di alokasikan ke *UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dan pada akhir tahun 1998, lebih \$221,972,989 telah disumbangkan kepada Palestina. Norwegia juga menjanjikan bantuan dana selama lima tahun kepada Palestina, yakni dari tahun 1999-2003 sebanyak US\$151,8 juta untuk kamp-kamp pengungsian Palestina, di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat dan di negara-negara tetangga. Norwegia juga membuktikan kontribusinya terhadap upaya pengembangan pemerintahan Palestina melalui *Road Safety Program*, salah satu program perencanaan PRDP yang berfokus pada upaya rekonstruksi infrastruktur Palestina. Dalam program ini, Norwegia berperan sebagai negara donor dan memberikan bantuan dana pada 2008-2010 dengan total US\$422 juta (Palestinian National Authority, 2008). Selain itu, tercatat bahwa Norwegia bekerjasama dengan beberapa negara donor lain memberikan bantuan dana kepada berbagai program PRDP, diantaranya program *Justice Now* (JN) sejumlah US\$17,5 juta, program *Efficient and Effective Government* (EEG) sejumlah US\$13,5 juta, program *Quality Education for All* (QEFA) sebanyak US\$40,5 juta (Palestinian National Authority, 2008). Dengan data tersebut, Palestina tercatat sebagai negara penerima bantuan dana terbesar dari Norwegia sepanjang 2001-2008 (World Bank, 2010).

Pada tahun 2014, konflik antara Israel-Palestina kembali mencapai eskalasi sehingga terjadi perang diantara kedua negara yang dikenal sebagai tragedi *Gaza Crisis* atau *50 Days of War*. Tragedi ini kemudian menstimulus berbagai negara untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian kedua negara, dan diantaranya diwujudkan dalam bentuk bantuan dana kepada para korban dalam konflik ini. Tercatat, total bantuan dari 54 negara mencapai US\$5 milyar dengan sumbangan dana sebanyak US\$362,4 juta berasal dari Norwegia (World Bank, 2015). Namun, pada 2015 terdapat penurunan dana bantuan yang disalurkan kepada *National Office for the Reconstruction of Gaza* (NORG), karena total bantuan dana dari 54 negara sejumlah US\$3,5 milyar. Dalam periode ini, Norwegia juga tercatat menurunkan bantuan dananya hingga total bantuan dana yang disalurkan sebanyak US\$144,9 juta,

menurun sekitar 60% dari total bantuan pada tahun sebelumnya (World Bank, 2015). Penurunan bantuan ini dilatarbelakangi oleh dukungan dana Norwegia terhadap pembentukan organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) Palestina dan Israel yang aktif melakukan program di Jalur Gaza dengan total \$1,926,838 sepanjang tahun 2015 (NGO-monitor, 2016).

Pada tahun 2016, dana bantuan yang disalurkan kepada NORG kembali mengalami sedikit penurunan, dikarenakan total yang terkumpul adalah US\$3,5 milyar. Namun pada tahun ini, total jumlah bantuan dana Norwegia mencapai US\$145 juta yang menandakan adanya peningkatan bantuan jika dibandingkan dengan tahun lalu (World Bank, 2016). Disamping itu, Norwegia juga masih konsisten dalam menyalurkan bantuan dana terhadap NGO di Israel dan Palestina di Gaza dengan total US\$1,9 juta (NGO-monitor, 2016). Tentunya, hal ini menandakan bahwa komitmen Norwegia dalam upaya penyelesaian konflik Israel – Palestina tetap konsisten.

### **Proses Terbentuknya Identitas Peran Norwegia sebagai Peace Nation**

Identitas peran sebagai *peace nation* menjadi salah satu faktor determinan dalam kebijakan luar negeri Norwegia yang berorientasi pada upaya perdamaian dunia. Dalam prosesnya, identitas ini terbentuk melalui proses *Cultural Selection*, secara khusus dengan mekanisme *Social Learning*. Dalam mekanisme ini, identitas peran terbentuk melalui pembelajaran negara terkait perlakuan yang dilihat dan diterima dari aktor lain (*significant others*). Perlakuan ini kemudian menjadi refleksi penilaian (*reflected appraisals*) bagi negara untuk menentukan sikap dalam merespon aktor maupun fenomena hubungan internasional melalui kebijakan luar negeri (Wendt, 1999, p.327).

Fakta bahwa Norwegia telah merasakan langsung penderitaan, kehancuran dan berbagai dampak negatif atas keterlibatan dalam berbagai konflik dan perang, seperti *Northern Seven Year' War* (1563-1570), *Kalmar War* (1611-16), dan *Great Northern War* (1700-1721) menjadi *reflected appraisals* bagi Norwegia memberikan penilaian bahwa perang adalah tindakan yang perlu dicegah. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesadaran bagi Norwegia bahwa perdamaian adalah solusi, terlebih ketika perang semakin marak terjadi dalam skala yang lebih besar pada abad-abad selanjutnya, seperti Perang di Eropa pada periode 1848 dan 1872, Perang Penyatuan Jerman (*German Unification*), dan Perang Krimea (Leira, 2013, p.3). Oleh karena itu, sebagai salah satu aktor hubungan internasional, Norwegia merasa perlu ikut andil dalam upaya perdamaian dunia, yang secara eksplisit tertulis sebagai berikut: “*For several decades, Norway has played the role of facilitator between parties to conflicts. Promoting conflict resolution and reconciliation is a central aspect of Norwegian foreign policy.*” (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2019).

Dalam perspektif Norwegia, konflik menjadi hambatan terbesar bagi negara untuk dapat terus berkembang. Situasi tersebut tentunya dapat menciptakan instabilitas kawasan regional, bahkan sangat berpeluang menciptakan instabilitas dalam skala global. Instabilitas dapat berwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu kekerasan, serta hilangnya kendali negara atas wilayah dan perbatasan teritorialnya. Melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan resolusi konflik, Norwegia

mendukung dan mengupayakan terciptanya *lasting political solutions* dalam skala lokal, regional, dan internasional. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan luar negeri, diantaranya yaitu peran sebagai fasilitator atau mediator dalam berbagai perundingan, membentuk berbagai organisasi atau komite yang berfokus pada upaya penyelesaian konflik, serta penyaluran bantuan dana. Melalui kebijakan tersebut, Norwegia berharap dapat mempengaruhi negara lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga peluang terciptanya perdamaian dunia akan semakin meningkat (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2016).

Dalam perkembangannya, kebijakan luar negeri Norwegia yang berorientasi pada perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi dalam organisasi internasional, diantaranya yaitu *Second Hague Peace Conference*, *The Central Organization for a Lasting Peace*, dan *The Carnegie Endowment for International Peace*. Selain itu, upaya perdamaian dunia juga diwujudkan Norwegia melalui organisasi nasional, namun juga melalui pembentukan organisasi nasional, yaitu *Norwegian Peace Association* atau *Norges Fredslag*, *Norwegian Peace Council* atau *Norges Fredsrag*, *Peoples Association Against War*, *Narvik Peace Centre*, *Information-Workers for Peace*, *Bike for Peace*, *Door for Peace*, *Norwegian International Organization for Justice and Peace* (NIOJP), *Oslo Centre for Peace and Human Right*, dan *Norwegian Nobel Committee* (International Peace Bureau, 2019).

Politisi Norwegia, Cornelius Bernhard Hanssen, menyatakan bahwa Norwegia adalah bangsa pecinta damai yang sangat mendukung perdamaian dunia melalui pernyataannya: "*We Norwegians believe ourselves to be a peaceful people, we love peace and work for peace*" (Leira, 2013, p.1). Bahkan, pada tahun 2018, Global Peace Index menempatkan Norwegia sebagai negara paling damai ke-16 dari total 163 negara di dunia (Global Peace Index, 2018).

### **Peran Norwegia sebagai *Peace Nation* dalam Konflik Israel-Palestina**

Buku Putih Pemerintah Norwegia (*Norwegian White Paper*) periode 2015-2016 memaparkan bahwa kehancuran bangunan fisik dan korban jiwa dalam konflik Israel-Palestina telah menciptakan krisis kemanusiaan. Hal ini menjadi alasan terbesar Norwegia sebagai *peace nation* untuk semakin terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dengan menyalurkan berbagai bantuan dan menjadikan jalur Gaza sebagai wilayah proteksi legal (*legal protection*). Hal ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Norwegia yang berfokus pada beberapa isu, di antaranya yaitu perjuangan hak asasi manusia dan upaya perdamaian (*peace effort*) (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2015).

Pada 12-13 Mei 2014, Presiden Israel Shimon Peres melakukan kunjungan kenegaraan ke Norwegia. Selain untuk menjaga hubungan baik antar negara, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membahas beberapa isu penting oleh kedua negara, diantaranya yaitu bahaya nuklir Iran, peningkatan status Israel di negara-negara Skandinavia, dan kemajuan proses perdamaian di Timur Tengah (Cashman, 2014). Pada acara jamuan makan penyambutan Presiden Peres pada 12 Mei 2015 di istana negara (Royal Palace of Norway), Raja Harald V yang menyatakan harapan bagi Israel agar selalu menjaga komitmen untuk menciptakan resolusi konflik dengan



Palestina. Sementara itu, dalam konferensi pers resmi di hari dan tempat yang sama, Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, juga menyampaikan dukungan kepada Israel dalam konflik dengan Palestina dengan menekankan pada *two state solution* sebagai prinsip dalam DoP harus tetap diimplementasikan (United Nations, 2016).

Selain itu, Menteri Luar Negeri Norwegia, Borge Brende, dalam pidato pembukaan pertemuan resmi anggota AHLC pada 22 September 2014 di New York menyatakan harapan terciptanya kehidupan bernegara antara Israel-Palestina yang saling hidup berdampingan melalui pernyataan: “*It is high time to reaffirm, both in words and in actions, our commitment to the vision of an independent Palestinian state living side by side with Israel in peace and security.*” (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2014).

Komitmen Norwegia dalam upaya penyelesaian konflik tersebut diwujudkan melalui penyediaan anggaran dana bantuan bagi masyarakat Palestina. Melalui kerja sama dengan pemerintah Palestina, Norwegia mengalokasikan dana tersebut dalam program pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan, pendidikan, dan upaya pembentukan *good governance* melalui masyarakat sipil, aktor multilateral, dan mitra pemerintah. Selain itu, Norwegia juga secara rutin dan berkala menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan dan kebutuhan primer lainnya ke beberapa wilayah yang sulit untuk di akses pemerintah Palestina atau yang disebut area C, yaitu Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat (The Representative Office of Norway to the Palestinian Authority, 2019).

Kebijakan luar negeri Norwegia terkait bantuan untuk Palestina juga diwujudkan melalui eksistensi *Norwegian Church Aid* (NCA). Sebagai organisasi nasional berbasis nilai-nilai Kristiani yang memperjuangkan keadilan global tanpa melakukan diskriminasi latar belakang di lebih dari 50 negara, NCA di bawah otoritas pemerintah Norwegia bekerja sama dengan Denmark melalui *Danish Church Aid* (DCA) untuk memperjuangkan hak-hak Palestina melalui penyaluran bantuan kemanusiaan. Kerja sama ini dikenal sebagai *DCA-NCA's Joint Country Programme*, dan telah mendirikan markas di wilayah Timur Yerusalem serta aktif menyalurkan bantuan sejak tahun 1950 hingga saat ini (Norwegian Church Aid, 2019). Program ini memiliki empat fokus utama, yaitu: 1.) *Human response*, 2.) *Economic empowerment*, 3.) *Active citizenship*, dan 4.) *International advocacy*. Pada tahun 2011-2016, total bantuan Norwegia terhadap program ini mencapai US\$1,5 miliar (Norwegian Church Aid, 2019). Peran Norwegia dalam penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat signifikan selama bertahun-tahun dalam program ini menunjukkan keseriusan Norwegia dalam mengupayakan resolusi konflik Israel-Palestina.

## **KESIMPULAN**

Catatan sejarah menunjukkan bahwa konflik antar negara menjadi faktor utama terjadinya perang. Sebagai salah satu negara yang terlibat dalam berbagai perang dan merasakan langsung penderitaan akibat perang tersebut menciptakan penilaian bagi Norwegia bahwa perdamaian dunia sangat perlu untuk diwujudkan demi mencegah terjadinya berbagai penderitaan akibat perang. Selain negara yang terlibat konflik, dibutuhkan peran negara lain untuk mencegah terjadinya perang.

Dengan demikian, dalam proses selanjutnya, penilaian ini mendorong pembentukan identitas peran Norwegia sebagai *peace nation*. Hal inilah yang kemudian mendorong Norwegia untuk turut berperan dalam upaya resolusi konflik Israel-Palestina.

Melalui *Oslo Accord* dan AHLC, Norwegia menunjukkan bahwa komitmen menjadi hal yang paling dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi negara dalam upaya penyelesaian konflik. Komitmen ini didasari oleh gagasan bahwa Norwegia menyanggah status sebagai negara damai, dan status tersebut kemudian secara implisit membentuk tanggung jawab bagi Norwegia untuk turut berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia.

Menyanggah peran sebagai fasilitator, mediator, dan sponsor dalam berbagai proses negosiasi, penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan, menciptakan lembaga kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan resolusi konflik, serta memberi respon terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan konflik kedua negara menjadi wujud kebijakan luar negeri Norwegia dalam upaya perdamaian Israel-Palestina.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alasan Norwegia memiliki komitmen tinggi dalam upaya perdamaian Israel-Palestina dilatar belakangi oleh identitas peran Norwegia sebagai *peace nation*. Dalam sistem internasional, peran ini menjadi faktor determinan dalam menentukan kebijakan luar negeri sehingga dalam konflik Israel-Palestina, Norwegia tampil sebagai aktor yang sangat konsisten dalam mendukung upaya resolusi konflik kedua negara hingga saat ini.

#### **REFERENSI:**

- Amnesty International (2014) Families Under the Rubbles: Israeli Attacks on Inhabited Homes [Online], 3 November.  
Tersedia di: <<https://www.amnestyusa.org/reports/families-under-the-rubble-israeliattacks-on-inhabited-homes/>> [diakses 22 November 2018].
- Global Peace Index (2018) Quantifying Peace and Its Benefits, [Online]. Tersedia di: <<http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf>> [diakses 19 Februari 2019]
- Grevle, T.E. (2012). The Norwegian Aid Effort in the Oslo Peace Process 1993-2000: Why Norwegian Aid Increased as the Peace Process Deteriorated. Disertasi Master's Programme in Peace and Conflict Studies (PECOS), University of Oslo.
- International Business Publication USA. (2016). *Palestine (West Bank & Gaza) Business Law Handbook*. Washington DC: USA.
- International Peace Bureau (2019) For a World without a War [Online]. Tersedia di: <<http://www.ipb.org/who-we-are/>> [diakses 22 Desember 2018].
- Leira, H. (2013). 'Our Entire People are Natural Born Friends of Peace': The Norwegian Foreign Policy of Peace. *Swiss Political Science Review*, 19 (3).
- Local Aid Coordination Secretariat (2011) Local aid coordination structure in the State of Palestine [Online]. Tersedia di: <<http://www.lacs.ps/article.aspx?id=4>> [diakses 10 Oktober 2018]

- Morris, B. (2009). *One State, Two State: Resolving the Israel Palestine Conflict*. London: Yale University Press
- NGO-Monitor (2016) Norwegian Funding Update 2016 [Online], September 14. Tersedia di: <<https://www.ngo-monitor.org/reports/norwegian-funding-update-2016>> [diakses 11 Mei 2018].
- Norwegian Church Aid (2019) Where We Work [Online]. Tersedia di: <<https://www.kirkensnodhjelp.no/en/where-we-work/palestine-and-israel/>> [diakses 22 Februari 2019].
- Pisarska, K. (2016). *The Domestic of Public Diplomacy: Evaluating Success Through Civil Engagement*. London: Palgrave Macmilan.
- Skandland, H.O. (2010). Norway is a peace nation': A discourse analytic reading of the Norwegian peace engagement. *Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)*, 45(1).
- The Foreign Policy (2018) The Oslo Accords Are Dead, but There Is Still a Path to Peace [Online], 13 September. Tersedia di: <<https://foreignpolicy.com/2018/09/13/the-oslo-accords-are-dead-but-there-is-still-a-path-to-peace-israeli-palestinian-rabbit-clinton/>> [diakses 22 Februari 2019]
- The New York Times (2015) What Oslo Accord Accomplished [Online], 30 September. Tersedia di: <<https://www.nytimes.com/2015/10/01/world/middleeast/palestiniansmahmoud-abbas-oslo-peace-accords.html>> [diakses 2 Desember 2018]
- UN-Missions. (2017). Report to the Ad Hoc Liaison Committee [Online], 8 September. Tersedia di: <[https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco\\_ahlc\\_report\\_september\\_2017.pdf](https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_september_2017.pdf)> [diakses 11 April 2018].
- United Nations (2014) Urging Israeli-Palestinian Parties to Renew Ceasefire Efforts, Secretary-General Tells Security Council Conflict's Root Causes Must Be Addressed [Online], 22 Juli. Tersedia di: <<https://www.un.org/press/en/2014/sc11485.doc.htm>> [diakses 2 Januari 2019].
- Norwegian Ministry of Foreign Affairs (2009) Explaining the Oslo Back Channel: Norway's Political Past in the Middle East [Online], 30 Mei. Tersedia di: <<https://www.regjeringen.no/en/find-document/dep/UD/Reports-programmes-of-action-and-plans/Reports/2001/norwegians-who-needs-norwegians/id451594/>> [diakses 25 Januari 2019]
- 
- \_\_\_\_\_ (2014) Gaza crisis: Foreign Minister urges parties to enter into immediate ceasefire [Online], 28 Juli. Tersedia di: <<https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/pm-ceasefire/id765490/>> [diakses 14 Januari 2019].
- 
- \_\_\_\_\_ (2018) Norway to make extraordinary contribution to Palestine refugees [Online]. Tersedia di: <[https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/extraordinary\\_contribution/id261246/](https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/extraordinary_contribution/id261246/)> [diakses 24 Januari 2019].

- \_\_\_\_\_ (2015). Norway to provide NOK 50 million to support refugees in transit countries [Online], 21 April. Tersedia di: <[https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/50mill\\_refugees\\_transit/id2407368/](https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/50mill_refugees_transit/id2407368/)> [diakses 7 Januari 2019].
- \_\_\_\_\_ (2016). Norway's engagement in peace processes since 1993 [Online], 17 November. Tersedia di: <<https://www.regjeringen.no/en/search/id86008/?isfilteropen=True&term=palestine+2016>> [diakses 1 Desember 2019].
- \_\_\_\_\_ (1999). Ministry of Foreign Affairs - Norway's involvement in the peace process in the Middle East [Online], 31 Oktober. Tersedia di: <<https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/involvement/id420034/?q=palestine%201999>> [diakses 3 Februari 2019].
- \_\_\_\_\_ (2019). Peace and reconciliation efforts [Online]. Tersedia di: <<https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-reconciliation-efforts/id1158/>> [diakses 28 Januari 2019].
- \_\_\_\_\_ (2017). Report No. 40 to the Storting (2008-2009) - Norway's Humanitarian Policy [Online]. Tersedia di: <<https://www.regjeringen.no/en/search/id86008/?term=Norway+will+give+protection+to+refugees>> [diakses 21 Januari 2019].
- Palestine National Authority. (2008). *Report to the Meeting for the Ad-Hoc Liaison Committee*.
- Shlaim, A. (2005) *The Rise and Fall of Oslo Peace Process*. Dalam: Fawcett, L. *International Relations of the Middle East*. Oxford:Oxford University Press.
- The Representative Office of Norway to the Palestinian Authority (2019) *New Action Plan on Women, Peace and Security* [Online], 11 Januari. Tersedia di: <<https://www.norway.no/en/palestine/norway-palestine/news-events/news2/new-action-plan-on-women-peace-and-security/>> [diakses 30 Januari 2019].
- The World Bank (2017) *Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee- May 2017* [Online]. Tersedia di: <<http://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-monitoring-report-to-the-ad-hoc-liaison-committee-may-2017>> [diakses 2 Oktober 2018].
- \_\_\_\_\_ (2015) *Gaza Economy on the Verge of Collapse, Youth Unemployment Highest in the Region at 60 Percent* [Online], 18 April. Tersedia di: <<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/05/21/gaza-economy-on-the-verge-of-collapse>> [diakses 12 Oktober 2018].

- 
- \_\_\_\_\_ (2016) Palestinian Authority Incurs US\$285 Million in Annual Fiscal Losses [Online], 18 April. Tersedia di:  
<<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/18/palestinian-authority-incurs-us285-million-in-annual-fiscal-losses>> [diakses 12 Oktober 2018].
- Waage, H. (2005). *Norwegians? Who Needs Norwegians? Explaining the Oslo Back Channel: Norway's Political Past in the Middle East*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Waage, H.H. (2004). *Peacemaking is the Risky Business: Norway's Role in the Middle East*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.